

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta mengadvokasi pendayagunaan *social media* dalam membahas isu Politik Lingkungan yang mengedepankan Demokrasi digital, studi kasus pada akun Twitter (@idbaruid), *social media* dapat memproses upaya strategis yang terencana untuk mendapatkan komitmen ataupun dukungan dari para pihak terkait dari setiap permasalahan serta mengakomodir, Adapun tiga cara: (1) sebagai media platform untuk memberikan informasi alternatif; (2) sebuah platform yang berperan media baru, untuk mendapatkan kemauan politik dalam masyarakat; (3) Sebagai platform untuk meningkatkan kekuatan oposisi untuk memobilisasi akan hubungan actor manusia dan lingkungan.

Revolusi 4.0 akan kemajuan teknologi komunikasi di dunia semakin memudahkan masyarakat untuk berinteraksi tanpa jarak dan waktu, kebebasan mengakses informasi melalui internet, berupa media cetak maupun media elektronik yang sekarang sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. (Andriani, 2022). Saat ini kita memulai dimana masa yang keseluruhan menggunakan media elektronik seluruh aspek kehidupan bersentuhan langsung dengan teknologi informasi dan komunikasi. kebebasan dalam menyampaikan berbagai bentuk informasi memudahkan kita menyuarakan Gerakan terkait advokasi lingkungan, melihat kebijakan dan penegakan hukum yang

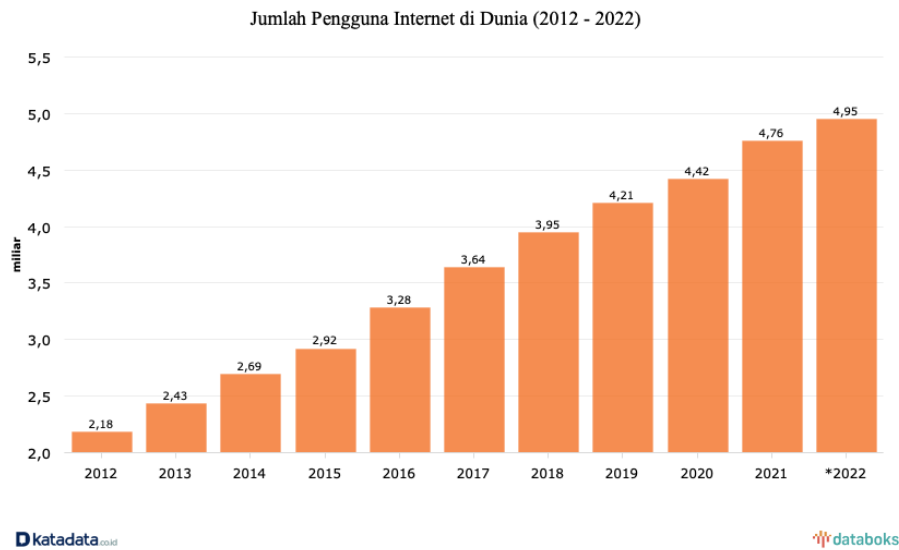
tersentralisasi, merubah kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan hidup, teknologi informasi berkembang sangatlah pesat dalam satu dasawarsa pertama di abad 21. Di era serba akan digital disebut sebagai IOT (*internet of things*) terdapat akan fasilitas interaksi yang dapat dijadikan pondasi stimulus bagi beberapa masyarakat. Sepatutnya peningkatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebaiknya tidak sebatas hanya pada ketersediaan infrastruktur media, meskipun pada akhirnya tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya infrastruktur merupakan kunci utama dalam keberhasilan teknologi komunikasi yang kemudian menjadi landasan dalam perkembangan komunikasi politik yang memang selalu berjalan beriringan dengan kebebasan berdemokrasi, khususnya dengan kebebasan berpendapat. Di sisi lain adanya penunjang *social media* yang mampu menjembatani bahkan memperluas akses informasi oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Sehingga pada akhirnya bermuara akhir pada terciptanya suatu kemampuan akan informasi yang efektif dalam proses politik di Media digital (Boestam et al., 2023). Indonesia adalah negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, satu hal dasar yang selalu dijunjung sejak era reformasi 20 tahun silam. salah satu prinsip demokrasi yang selalu dijunjung tinggi di negara ini adalah kebebasan, setiap warga negara dipastikan memiliki hak yang kebebasan yang sejajar di mata negara. Sorensen mengatakan, demokrasi membutuhkan pengakuan atas hak-hak dasar manusia (bill of right).

Heidegger mengatakan di dalam esainya "*The Question Concerning Technology*" bahwa umat manusia baru-baru ini memikirkan akan teknologi sebagai sesuatu yang dianggap berguna dan antropologis, yang dipahami sebagai

berguna bahwa teknologi salah satu cara untuk mencapai tujuan, yaitu dengan kompleks khusus dari penemuan alat-alat yang diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu sedangkan dalil antropologi mengungkapkan bahwa teknologi sendiri salah satu kegiatan manusia, penggunaan peralatan. Setelah dapat diartikan sebagai salah satu konsep yang langsung dengan sewajarnya, Heidegger berpesan bahwa kita untuk mempertimbangkan social media/media massa bukan menjadi satu peralatan, maupun sebagai kegiatan manusia yang spesifik. Dengan mempertimbangkan social media/media digital (dalam pokoknya) sebagai bentuk yang berbeda (suatu cara untuk mengungkapkan opini serta kebebasan dalam bersuara). Heidegger menunjukan bahwa teknologi menjadi suatu cara berpikir mengenai alam sebagai suatu cadangan tetap, sebagai suatu sumber untuk dipulihkan, ditata dan dikontrol.

Hak mutlak adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini berlandaskan pada konstitusi republik Indonesia yang bermaklumat pada pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat, berkumpul. hak-hak dasar kebebasan tersebut bisa dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan sebagainya, tatkala juga kemudian dapat dimaknakan sebagai bentuk partisipasi.

Gambar 1.1 Penggunaan Social Media (2022)



Sumber: Databoks.katadata.co.id (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa platform social Media memiliki penggunaan besar terbesar di Tahun 2022 dengan total 4,95 juta pengguna. Dapat dilihat bahwa *social media* per-Tahun memiliki kenaikan yang cukup drastis. Dalam data tersebut Indonesia juga memiliki pengguna terbesar nomor 6 pada *Social Media* Twitter sebesar 18,45 juta pengguna. (Phalevi, 2022). Pengguna Internet di Indonesia, rata-rata menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam per-hari. Sementara penggunaan Internet melalui Smartphone sekitar 2,5 jam per-hari (Lee, 2023). Disisi lain social media juga bisa menjadi kekuatan yang cukup vital, kebebasan dalam teknologi informasi berkaitan dengan (*The enlightenment age*) yang berasal dari tradisi hukum barat yang dikenal dengan era pencerahan, tempat munculnya sebuah gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi. (Himawan, 2022). Segi kebebasan berpendapat

Upaya advokasi yang akan menjelaskan bahwa teknologi digital mempengaruhi proses demokrasi, Adapun mobilisasi massa yang digunakan demokrasi digital untuk memobilisasi massa memperjuangkan isu lingkungan, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Demokrasi digital mengalami perkembangan model, model ini memiliki beberapa kelebihan, adanya ruang partisipasi politik yang cukup luas yang dapat diakses setiap warga negara. Demokrasi digital lahir akibat adanya pengaruh arus teknologi informasi (Rahman, 2020). Menurut Roosevelt “*Democracy is not a static thing*”. Demokrasi itu dinamis, sedinamis peradaban manusia yang menggunakannya (Rahman, 2020). Teknologi menjadi dasar yang mempengaruhi dinamisasi demokrasi yang menjadikan melahirkan model terbaru dari demokrasi itu sendiri.

Adanya peran masa serta adanya sarana-sarana demokrasi digital kebebasan kelompok-kelompok advokasi lingkungan berperan penting Gerakan-gerakan digital, adanya sebuah wadah masyarakat bekerja untuk melawan para elit berkuasa. advokasi mengemukakan dikarenakan berbagai macam alasan, adanya Gerakan #kebebasan berpendapat di akun twitter @idbaruid yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Flores sedang memperjuangkan hak atas tanah adat, kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi yang diatur Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satu adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. (Latipah, 2020).

Ekspedisi Indonesia Baru (@idbaruid) yang dipelopori oleh Dandhy Laksono merupakan ekspedisi keliling Indonesia dengan misi mendokumentasikan masyarakat dan alam dari berbagai aspek. berbagai upaya advokasi berupa film

dokumenter yang digarap dikarenakan berbagai macam alasan, seperti pelanggaran HAM, degradasi Lingkungan, perang dan kondisi sosial lainnya berdampak akan kerugian masyarakat luas. Ekspedisi Indonesia Baru merupakan Kloter ke-2 yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan berusaha untuk mempromosikan keberlanjutan dan konservasi lingkungan. lingkungan dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti kampanye, advokasi, dan penggalangan dana untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan. akan tetapi, alasan utama mengapa sejumlah besar massa secara historis Bersatu mengungkapkan kemarahan mereka terhadap kelas dan kekuatan yang dominan ialah eksploitasi dan penindasan (Riyadi et al., 2023). Julie Stirling menyatakan advokasi serangkaian perbuatan yang dilaksanakan secara bertahap atau berproses, adanya influen yang diberikan dengan maksud mengubah kebijakan publik.(Riyadi et al., 2023). Ekspedisi Indonesia Baru (@idbaruid) menggagas berbagai serangkaian upaya memperbaiki, membela dan mewadahi masyarakat termarjinalkan akan kepentingan elit tertentu. Kebijakan Lingkungan sering sekali menjadi sebuah faktor tertentu terjadinya kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat. sering kali kita melihat kasus agraria dan perambahan hutan, pembukaan lahan adat, eksploitasi udara akibat tambang, dan lain sebagainya, kasus-kasus tersebut akan menyeret keterlibatan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, instansi-instansi terkait, masyarakat, hingga Lembaga-lembaga yang berorientasi pada advokasi kasus-kasus lingkungan hidup. aspek lingkungan kerap kali didengar dan dikesampingkan oleh pemerintah dalam agenda politik, maka sangat diperlukan adanya dorongan Gerakan-gerakan yang

berpihak secara ideologi, terstruktur dan sistematis untuk memperjuangkan keberlangsungan lingkungan.

Menurut Mangunjaya dan McKay, Menangani problem Lingkungan tidak dapat pada pendekatan struktural, karena akan menimbulkan konflik kepentingan dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan swasta sedangkan masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari tempat mereka tinggal. oleh sebab itu sangat diperlukannya kebijakan yang komprehensif dan inovatif, yang melibatkan elemen sosial, budaya dan agama dari masyarakat. Mangunjaya dan Mckay inisiatif mengatakan bahwa banyak inisiatif perlindungan lingkungan harus melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, keagamaan. LSM internasional dan kebijakan pemerintah di tingkat regional dan nasional (Zaman et al., 2021).

Dengan adanya media digital sangat memudahkan menyebarkan berbagai bentuk berita dan media gambar elektronik ke public. *Social Media* mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, kita melihat dimana setiap individu dapat menciptakan jejaring sosial digital dalam melakukan interaksi dan mendapatkan informasi serta berita maupun opini dengan efektif dan efisien (Ayub & Sulaiman, 2022). Di satu sisi *Social media* hadir sebagai perpaduan dan arus komunikasi dengan adanya perkembangan teknologi, hal ini sudah sering ketahui bahwa platform yang digunakan oleh orang untuk membangun jejaring sosial atau mengedukasi tentang penggunaan sosial media dalam mengeksplorasi terkait isu politik lingkungan. Usaha yang terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan problem untuk memperjuangkan hak lingkungan, upaya lain dalam

Gerakan advokasi Ekspedisi Indonesia Baru juga dilakukan dalam bentuk maya melalui #Harimasyarakatadatsedunia di Twitter, meski di dalam undang-undang dasar Pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan atas hak tradisional masyarakat hukum adat, Tegar ini digunakan untuk mengampanyekan perlindungan masyarakat Tanah Abi banyak mendapatkan tekanan dari luar. Pengawasan terhadap kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah yang diambil berbagai regulasi, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 berbunyi “pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah dan perusahaan”.

Social Media juga memainkan peran penting dalam pola pikir, opini hingga kehidupan masyarakat, sebab *Social Media* memiliki manfaat dalam aktivitas advokasi, sebagai alat yang ampuh, Adapun cara *Social Media* dapat digunakan untuk mengadvokasi: *Social media* dapat mempengaruhi opini public (*Influencing public opinion*), sebagai bentuk mobilisasi dukungan untuk suatu tujuan atau masalah (*Mobilizing support*), dan Sebuah jejaring dan koalisi dengan advokat dan organisasi (*Building networks*), *Social media* dapat digunakan untuk berbagai informasi tentang isu-isu sosial dan upaya advokasi (*Sharing information*). (Gudiño León. et al., 2021). *Social Media* mengalami perkembangan yang cukup pesat, sebagian besar interaksi sosial dan telah melihat media alternatif untuk berinteraksi dan berdiskusi tanpa adanya batas wilayah negara (Miladi, 2016). Konflik lingkungan merupakan persoalan pertentangan negara dan pemerintah untuk bisa konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan menyejahterakan seluruh

masyarakat, ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintah dan negara. Seperti yang dipaparkan oleh Notoatmodjo advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan (*approaches*) adanya pengaruh yang dianggap berhasil dalam suatu program yang dilakukan (Zulyadi, 2014). Adanya peran yang aktif dan terarah (*directive*), dimana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan maupun layanan.

Berdasarkan Latar belakang penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akun *Social Media @idbaruid* untuk mengeksplorasi serta mengadvokasi tentang penggunaan social media dalam membahas isu Politik Lingkungan yang mengedepankan Demokrasi digital, Pengaruh Media yang sudah sangat besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat, media dapat menjadi representasi masyarakat, sebagai alat kontrol masyarakat untuk pembuat kebijakan sering sekali social media dapat memproses upaya strategis yang terencana untuk mendapatkan komitmen ataupun dukungan dari para pihak terkait dari setiap permasalahan serta mengakomodir dengan judul ***“Demokrasi Digital: Studi advokasi Politik Lingkungan pada akun Ekspedisi Indonesia Baru (@idbaruid)”*** untuk mengkaji sejauh mana pendayagunaan *Social media* mengadvokasi berbagai isu-isu lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat beberapa hal pokok yang dijadikan permasalahan sebagai penelitian yaitu sejauh mana media digital berperan sebagai media advokasi serta upaya yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Hal ini dibuktikan dengan beragam kasus-kasus lingkungan di kalangan masyarakat yang tidak tersentralisasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat tertarik mengajukan pertanyaan sebagai berikut bagaimana pendayagunaan sosial media sebagai bentuk penyuaran advokasi politik lingkungan oleh akun Twitter (X) @idbaruid?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana social media digunakan mengadvokasi permasalahan serta, Demokrasi digital berperan dalam media penyuaran pendapat.
2. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi kepentingan pelestarian dan memahami bagaimana media eksistensi, media mobilisasi, media informasi, media penyaluran dan media partisipasi dalam mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh akun @idbaruid.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berusaha memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- i. Diharapkan dapat menambah referensi dalam karya ilmiah, khususnya untuk penelitian yang sejenis berikutnya di masa yang akan datang.
- ii. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkhusus Ilmu Pemerintahan dalam penelitian Demokrasi digital terkait media digital berperan sebagai media advokasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- i. Bagi Masyarakat luas menjadi pedoman mengenai dampak media digital berperan sebagai media advokasi terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- ii. Bagi akademisi sebagai pendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam melakukan studi akademik mengenai media digital berperan sebagai media advokasi.
- iii. Bagi pemerintah sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan terkait eksplorasi sumber daya alam melalui pendekatan masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian Pustaka ini Peneliti menggunakan 15 literatur dari artikel jurnal yang berbeda-beda dan saling berkaitan dengan pendayagunaan *Social media* mengadvokasi berbagai isu-isu lingkungan. tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk mencari tahu letak persamaan dari penelitian yang akan dikaji dan juga mencari informasi/data untuk mendapatkan perbedaan dari kajian-kajian oleh sebelumnya. Literatur pada penelitian ini dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu: pertama, kajian tentang politik kebijakan lingkungan secara umum, kedua, kajian sebagai alat advokasi kebijakan public, dan ketiga, kajian tentang *social media* sebagai upaya strategis dalam penyuaran pendapat bagi masyarakat.

Literatur yang mengkaji tentang politik kebijakan lingkungan secara umum terdiri dari lima artikel jurnal yaitu yang dilakukan oleh (Ikhsanto, 2020), (Mukrimaa et al., 2016a), (Sufia et al., 2016), (Mulyadi, 2022) dan (Akhmaddhian, 2017). Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari kekayaan tambang maupun keanekaragaman hayati yang cukup luar biasa. dibalik dari kekayaan tersebut tersimpan tantangan yang cukup besar yang harus dijawab yaitu desain konstruksi politik lingkungan di indonesia, pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan (Mukrimaa et al., 2016a). politik lingkungan juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas kebijakan lingkungan dan memperkuat legitimasi kebijakan tersebut.

Namun, partisipasi publik juga memiliki tantangan seperti kesulitan dalam mengakses informasi, kepentingan yang beragam, dan perbedaan pandangan. Oleh karena itu, partisipasi publik harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup (Ikhsanto, 2020).

Kelompok literatur kedua membahas tentang dampak alat advokasi kebijakan public pada *Social media* @idbaruid terdiri dari lima artikel yaitu penelitian dari (Rahman, 2020), (Andriani, 2022), (Amrullah et al., 2020),(Santana et al., 2017) dan (Zaman et al., 2021) advokasi merupakan bentuk usaha untuk menumbuhkan akan kesadaran melalui media massa, kerjasama, kampanye (edukasi dan mobilisasi), lobi, riset dan Analisa kebijakan, hal ini tidak jauh dari bentuk promosi media massa atau menarik perhatian media dengan berupa konten dari akun Twitter @idbaruid adanya proyek film dokumenter Ekspedisi Indonesia Baru memberikan cerminan edukasi, adanya petisi *online* merupakan salah satu dari bentuk strategis kampanye yang meliputi usaha untuk mengedukasi serta memobilisasi. berkembangnya teknologi berimplikasi terhadap berubahnya strategi advokasi terutama aktivis kampanye. kampanye dalam advokasi kebijakan dilakukan untuk mengedukasi public. Penggunaan media sosial untuk advokasi dapat membantu membangun jejaring dengan organisasi melalui kegiatan-kegiatan bersama, pertemuan publik, dan media sosial. Selain itu, penggunaan media sosial dapat membantu advokat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat melalui petisi online dan kampanye sosial. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki risiko seperti penyebaran informasi yang salah dan penggunaan yang tidak etis. Oleh

karena itu, advokat harus memperhatikan etika dan keamanan dalam penggunaan media sosial untuk advokasi.

Kelompok Terakhir mengenai dampak social media sebagai upaya strategis dalam penyuaran pendapat bagi masyarakat. pada *Social media @idbaruid* terdiri dari lima artikel yaitu penelitian dari (Santana et al., 2017), (Rizam et al., 2022), (Zaman et al., 2021),(Rizam et al., 2022) dan (Mukrimaa et al., 2016a). Dalam konteks advokasi media, khususnya proyek yang digarap oleh akun Twitter @idbaruid, Ekspedisi Indonesia Baru dalam konteks advokasi media bagian dari kegiatan media massa, kegiatan advokasi lingkungan terkait dengan aktivitas pemberitahuan (mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita) pada berbagai masalah lingkungan hidup. konten yang dibuat oleh Ekspedisi Indonesia Baru berdimensi, antara lain: pada interaksi antar-komponen lingkungan, serta ada pengorientasian pada dampak faktor lingkungan, adanya kisaran konten dari level gen hingga level biosfer. salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh Ekspedisi Indonesia baru bisa di lihat dalam konten kerusakan lingkungan hidup seperti terjadi di Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. namun hal ini menjadi polemic tersendiri di pusat destinasi prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Penyampaian pendapat di Social media untuk menyebarkan hasil kajian mengenai isu-isu yang

menjadi perhatian adalah hubungan dan efektivitas dari penggunaan social media dalam mengadvokasi tersebut pada level individu. (Annisa Azhar Suryaningtyas 1, n.d.).

Tabel 1.1 Ringkasan Literatur Review

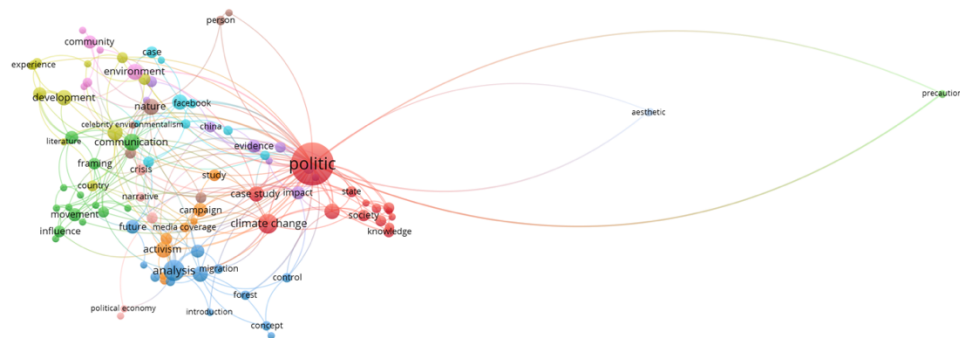
No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Politik kebijakan lingkungan secara umum	(Ikhsanto, 2020), (Mukrimaa et al., 2016a), (Sufia et al., 2016), (Mulyadi, 2022) dan (Akhmaddhian, 2017)	sumber daya alam yang melimpah baik dari kekayaan tambang maupun keanekaragaman hayati yang cukup luar biasa. dibalik dari kekayaan tersebut tersimpan tantangan yang cukup besar yang harus dijawab yaitu desain konstruksi politik lingkungan di indonesia, pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan
2	Sebagai alat advokasi kebijakan public	(Rahman, 2020), (Andriani, 2022), (Amrullah et al., 2020),(Santana et al., 2017) dan (Zaman et al., 2021)	advokasi merupakan bentuk usaha untuk menumbuhkan akan kesadaran melalui media massa, kerjasama, kampanye (edukasi dan mobilisasi), lobi, riset dan Analisa kebijakan, hal ini tidak jauh dari bentuk promosi media massa atau menarik perhatian media dengan berupa konten dari akun Twitter @idbaruid adanya proyek film dokumenter Ekspedisi Indonesia Baru memberikan cerminan edukasi, adanya petisi

			<p><i>online</i> merupakan salah satu dari bentuk strategis kampanye yang meliputi usaha untuk mengedukasi serta memobilisasi. berkembangnya teknologi berimplikasi terhadap berubahnya strategi advokasi terutama aktivis kampanye. kampanye dalam advokasi kebijakan dilakukan untuk mengedukasi public.</p>
3	Penyuaran pendapat bagi masyarakat.	(Santana et al., 2017), (Rizam et al., 2022), (Zaman et al., 2021),(Rizam et al., 2022) dan (Mukrimaa et al., 2016a)	<p>Dalam konteks advokasi media, khususnya proyek yang digarap oleh akun Twitter @idbaruid, Ekspedisi Indonesia Baru dalam konteks advokasi media bagian dari kegiatan media massa, kegiatan advokasi lingkungan terkait dengan aktivitas pemberitahuan (mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita) pada berbagai masalah lingkungan hidup. Penyampaian pendapat di Social media untuk menyebarkan hasil kajian mengenai isu-isu yang menjadi perhatian adalah hubungan dan efektivitas dari penggunaan social media dalam mengadvokasi tersebut pada level individu.</p>

Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam Kajian ini mencoba melihat Analisa advokasi politik lingkungan dalam *Social media* di Indonesia. Berdasarkan data Analisa Vos Viewer tentang riset terdahulu dalam database Scopus terdapat 315 dokumen dalam rentang tahun 2015 hingga 2022 terkait tema *Digital Democracy*, *environmental politics*, dan *social media*. pada analisis *Vos viewer* digunakan untuk memetakan keterkaitan *Digital Democracy*, *environmental politics*, dan *social media* dalam riset terdahulu, analisis ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Table 2.1.

Gambar 1.2 Pemetaan Riset Tentang Digital Democracy, environmental politics, dan social media (Scopus Database 2015-2022)



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Vos Viewer, 2023

Tabel 1.2 Vos Viewer Analysis Social Media, Digital democracy, Environmental politics on Scopus Database

Words	Cluster
Action, Anthropocene, case study, civil society, climate change, driver, governance, Implication, knowledge, politik, society, state, sustainability, transformation.	1
Climate, climate crisis, communication, environmental citizenship, environmental justice, framing, Friday, influence, jurnalisme, movement, network structure, public engagement, representation, sustainable development.	2
Analisis, concept, control, forest, fracking, future, global health, introducing, migration, perfective, population health, united state.	3
Brazil, challenge, country, covid, development, documentary, experience, global south, lesson, literature, pandemic, resistance	4
China, citizenship, democracy, effect, environmental, evidence, human health, impact, ngo, social media	5

Sumber: Vos Viewer Analysis

Pada Analisa Vos Viewer tersebut terdapat terlihat tema tema yang memiliki koneksi dengan Demokrasi Digital seperti: Democracy, social media dan movement. Berdasarkan hasil dalam Analisis Vos Viewer Analysis tersebut penelitian ini berfokus pada Cluster 5 dengan keyword yang muncul yaitu *China, citizenship, democracy, effect, environmental, evidence, human health, impact, ngo, social media*. Sementara cluster lain masih belum menggambarkan adanya relevansi dengan topic sebagai alat pendayagunaan *Social Media*, **terutama tidak ada keterkaitan dengan topik yang mengacu pada media social Twitter (X)**. Dengan demikian, hal ini menunjukkan kurangnya penelitian yang berkaitan dengan pendayagunaan media sosial sebagai alat advokasi politik lingkungan yang

dianalisis menggunakan media social Twitter. Hal inilah menjadi *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan Pustaka 15 jurnal penelitian terdahulu dan meta data yang divisualisasikan menggunakan vos Viewer dari database Scopus diatas menunjukkan bahwa masih belum ada penelitian yang dilakukan terkait pendayagunaan media sosial sebagai alat advokasi politik lingkungan pada Ekspedisi Indonesia Baru yang dianalisis melalui Social media Twitter (X).

Dalam melihat bentuk penyuaran pendapat, advokasi serta peran dalam social media di Indonesia perlu melihat pada beberapa kajian terdahulu, sebagaimana terlampir sebagai berikut: Berdasarkan tinjauan pustaka di atas telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan media digital berperan sebagai media advokasi serta upaya yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari pihak terkait. maka untuk membedakan penelitian ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang advokasi Politik Lingkungan pada akun Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid. terlebih pada penelitian ini menggunakan Teori politik lingkungan Hempel, yang dimana teori tersebut belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya. Maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada Analisa bagaimana social media digunakan mengadvokasi permasalahan serta, Demokrasi digital berperan dalam media penyuaran pendapat, mengeksplorasi kepentingan pelestarian dan memahami bagaimana mekanisme mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh akun @idbaruid.

F. Kerangka Teori

1. Teori Politik Lingkungan

Politik Lingkungan bersifat relatif karena tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak dan universal. Lamont C. Hempel Political Ecology, *“the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.”*. Kajian akan ketergantungan diantara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dan lingkungan, berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Dasar akan mengungkapkan dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

Menurut Lamont C. Hempel interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah Panjang dari berbagai disiplin ilmu. politik lingkungan merupakan sebuah pendekatan interdisiplin untuk melihat adanya hubungan manusia dan lingkungan dengan kaca mata kritis. pada umumnya, focus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan adanya perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan. karakteristik utama politik lingkungan adalah politisasi problem lingkungan. untuk melihat permasalahan lingkungan. ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai bentuk distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif serta imajinasi, menyadari hal

ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi: masalah demokrasi, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Menurut Kraft (2011) terdapat tiga perspektif dalam politik lingkungan yaitu perspektif ilmu pengetahuan yaitu: perspektif ekonomi, perspektif etika lingkungan, dalam perspektif ilmu pengetahuan, politik lingkungan harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh akademisi. Kraft (2011) mengatakan “*Many scientists (and business leaders as well) believe that environmental problems can be traced chiefly to a lack of scientific knowledge about the dynamics of natural systems or the use of technology.*” Pemerintah seharusnya berinvestasi sebesar-besarnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan.

perspektif kedua ekonomi. melihat dari perspektif ini paling utama untung rugi menjadi faktor utama, sebab Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Perspektif yang ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Di dalam perspektif ini, politik lingkungan adalah sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia. Etika lingkungan mengenal dua teori utama yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme (Nurmardiansyah 2014). Antroposentrisme adalah sebuah pemikiran yang fokus kepada keuntungan yang diperoleh manusia sedangkan ekosentrisme fokus kepada keutuhan dan keberlanjutan Bumi sebagai sebuah kesatuan tunggal (Richardson 1997).

Sedangkan menurut Watts (2000) mendefinisikan politik ekologi, tujuan politik ekologi adalah untuk menjelaskan konflik lingkungan khususnya konflik terkait pengetahuan, keadilan dan tata Kelola, meninjau dari penjelasan Watts diatas, bahwa politik lingkungan dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk memahami kompleksitas kepemilikan akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan dampaknya akan Kesehatan lingkungan dan keberlanjutan. Apabila dirangkum dalam sebuah logika pemikiran maka politik lingkungan merupakan instrumen untuk melihat rivalitas dan/atau kerjasama antara keadilan sosial, kepentingan pasar dan perlindungan lingkungan hidup. Politik lingkungan mengkaji aspek ekonomi politik dari pengelolaan sumber daya alam sebuah masyarakat (Mukrimaa et al., 2016b).

2. Digital Demokrasi

Digital Demokrasi yang dikenal di masyarakat merupakan informasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi mulai bergerak membentuk ruang-ruang public virtual sebagai sarana merepresentasikan kehendak dan menyatakan eksistensi mereka. Gilardi (2016), dalam penelitiannya digital demokrasi menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana teknologi digital akan mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini public hingga perangkat dan saluran tata Kelola pemerintah pun mulai berubah. Sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia beruntung memiliki Pancasila yang menjadi dasar dalam berdemokrasi. Penggunaan internet melahirkan unsur demokrasi yang baru berupa Digital democracy. *digital democracy* merupakan kesimpulan adanya upaya untuk mempraktikkan demokrasi

tanpa kenal batas waktu, ruang dan kondisi fisik lainnya, dengan adanya teknologi informasi informasi sebagai gantinya, sebagai tambahan, bukan pengganti praktik politik “analog” tradisional. bentuk dari praktik demokrasi digital menggunakan media digital untuk berkomunikasi secara online dan hanya terjadi di internet tapi juga harus punya dampak di dunia nyata (Alejos, 2017).

Menurut Leggewie dan Bieber kebebasan memperoleh atau memberikan informasi secara efektif lebih penting daripada potensi mendapatkan akses dalam berpolitik digital. Terobosan demokrasi yang disalurkan melalui sarana digital/virtual merupakan bentuk baru baru peningkatan kapasitas warga negara untuk mengembangkan serta meningkatkan adanya Gerakan sosial (S. Sasmita, 2011). Menurut Wilhelm (2003.244) adanya perubahan yang bisa dilakukan dengan adil dan mudah baik secara potensial bisa mengurangi beberapa hambatan. Akses/Hubungan virtual diasumsikan bisa menguntungkan dari *art* penyelesaian konflik. Dalam pemanfaatan aplikasi digital diprediksi sebagai upaya sebuah peradaban demokrasi baru yang kemudian dikenal dengan istilah *digital democracy* sebagai salah satu upaya yang nyata dalam mengimplementasikan demokrasi tanpa ada batas ruang dan waktu, kondisi fisik maupun dalam menggunakan sarana digitalisasi, sebagai tambahan saja, bukan menjadi pengganti praktik politik ‘analog’ tradisional (Boestam et al., 2023).

Beberapa pemikir teoritis mengenai *Digital Democracy* pada dekade 1960 di kalangan ilmuwan politik Amerika, munculnya perdebatan mengenai demokrasi elektronik. mereka memperdebatkan masa depan demokrasi pada abad ke-21, dan mengaitkan dengan kecenderungan kemajuan TIK. Habermas menyatakan

“Gagasan warga yang berasosiasi secara bebas dalam masyarakat sipil mengingatkan demokrasi langsung dari Athena kuno (*The idea of citizens deliberating in freely formed associations in civil society before taking that knowledge up to the level of government recalls the direct democracy of ancient Athens*), sedangkan demokrasi elektronik memperbaharui hal tersebut dengan berfokus pada bagaimana wacana politik dimediasi (*e-democracy updates this by focusing on how political discourse is mediated*). Internet muncul sebagai media komunikasi yang secara unik cocok untuk menyediakan beberapa arena untuk debat publik yang relatif spontan, fleksibel, dan, yang terpenting, diatur sendiri” (Dan et al., 2017) sedangkan menurut Hacker & Dijk (2000) mereka mendefinisikan Demokrasi digital (Digital democracy) sebagai, “Rangkaian usaha untuk menerapkan demokrasi dengan tanpa dibatasi oleh sekat waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya (*the limits of time, space, and other physical conditions*), namun dengan mengandalkan basis penerapan TIK dan Komunikasi ter-Mediasi Komputer *Computer-Mediated Communication (CMC)* yang berfungsi sebagai pengembangan- tambahan (*as an addition*), dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari praktik-praktik politik yang dianalogikan dengan tradisionalitas (*not a replacement for traditional ‘analogue’ political practices*).” Demokrasi digital yang mereka maksudkan meliputi penggunaan seluruh jenis-jenis media internet (*internet media*), penyiaran interaktif (*interactive broadcasting*), dan telepon digital (*digital telephones*) untuk tujuan-tujuan meningkatkan demokrasi atau partisipasi politik warga negara dalam komunikasi demokrasi (*Enhancing political democracy*

or citizen participation in democratic communication (Annis Azhar Suryaningtyas 1, n.d.).

Dalam konteks *Digital Democracy* dalam penggunaan media sosial dapat meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan, Social media merupakan media komunikasi memungkinkan setiap penggunanya untuk membuat kontennya tersendiri (Aldila Safitri et al., 2021). (Aldila Safitri et al., 2021). Internet dan social media memainkan peran penting dalam dari pelaksanaan komunikasi yang mana menyesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi yang tiap waktu mengalami perubahan. social media juga memainkan ranah politik yang ada di sebuah Kawasan. kebanyakan penggunaan oleh pendukung yang ada di sebuah Kawasan, kebanyakan penggunanya oleh pendukung yang ada di dalam satu ranah Kawasan seperti penggunaan social media Twitter untuk mendukung salah satu calon pemimpin dengan cara menyebarkan tweet tentang kampanye tertentu (Miller er., 2018).

TIK digunakan untuk bisa memfasilitasi penyediaan informasi dan untuk mendukung konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat. adanya peluang dan ruang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan demokrasi. Karena setiap orang berhak untuk ikut berpartisipasi secara langsung melalui *platform* TIK. Pemberdayagunaan TIK dalam konteks demokrasi untuk menghilangkan faktor-faktor Teknik bagi Sebagian orang atau serangkaian kelompok tertentu serta menghambat akan perwujudan partisipasi di satu negara. Siapapun warga negara yang berhak akan hendak menyampaikan aspirasinya, tidak akan perlu hadir dan tatap muka secara langsung, disinilah digital democracy

bermain peran serta membuka peluang langsung untuk meng institusionalisasi secara politik dan tetap berpatokan pada konsep demokrasi langsung (*direct democracy*).

Perkembangan Sistem teknologi informasi yang ada di tanah air tidak bisa dilepaskan dari system global. Seakan Indonesia saat ini merupakan bagian dari apa yang dikatakan McLuhan tidak ada tempat di tanah air yang terisolasi karena semuanya telah dihubungkan dengan jaringan komunikasi global (Wilhelm, n.d.). Dengan demikian ruang public politik tidak hanya terjadi di dalam media cetak dan media elektronik tetap harus diakui secara lambat tetapi pasti juga berlangsung di ruang *cyber* diskusi-diskusi mereka di media radio, televisi dan juga menggunakan jalur online seperti lewat e-mail. bahkan melalui internet warga negara bisa melakukan konferensi jarak jauh untuk mendiskusikan sesuatu hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan public.

Anthony G Wilhelm (2000) menjelaskan mengenai digital democracy merupakan usaha-usaha dalam menghambat akan konflik-konflik yang akan muncul Ketika akan ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mulai memanfaatkan untuk mencapai *digital democracy*. Wilhelm juga menghimbau bahwa partisipasi elemen masyarakat untuk ikut adil dan ruang public siber dimana masyarakat bisa menyalurkan argument/komunikasi sebagai bentuk warga negara dan mereka berharap akan opini mereka dapat pengaruh lebih dan menentukan akan keputusan dari para elit pemerintah. Keterlibatan berikutnya adalah akan adanya kesempatan akan akses partisipasi online, di era demokrasi seperti sekarang ini pembentukan opini dan pembuatan keputusan akan dianggap sah Ketika proses

tersebut mewakili harapan dari masyarakat yang akan terkena dari dampak dari kebijakan tersebut. Untuk bisa memberikan kepastian dari urusan kenegaraan masyarakat perlu membuat keadaan di dalam wadah masyarakat dimana setiap individu yang ingin berpartisipasi lebih di ruang public memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menyuarakan perhatian dan masing-masing memiliki kebutuhan atas pilihan.

Wilhelm menyatakan bahwa kebebasan merupakan sebuah bentuk unsur untuk melakukan debat, penyampaian argumentasi, bermusyawarah serta adanya penyampaian secara bebas akan isu-isu kebijakan yang substantif akan mengemukakan ide-ide kepada khalayak ramai. Jika dari serangkaian proses dibatasi maka dikatakan gagal pula proses pencapaian demokrasi. Arti dari ruang public merupakan adanya keberagaman pendapat. Ide-ide baru yang sebelumnya tidak disuarakan, muncul keluar dari pertentangan dialektik di ruang public. Prospek *digital democracy* disebutkan sebagai sebuah media baru yang memiliki dampak yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan komunikasi politik yang tujuan akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya kelompok masyarakat heterogen serta adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat. Lahirnya konsepsi antara masyarakat dengan jaringan media baru tidak hanya mendapatkan dampak perubahan kecepatan penyampaian informasi, bahkan akan lebih dari itu media massa konvensional bisa berpeluang untuk memerankan ruang media baru untuk bisa masuk ke dalam ranah *Social media*. Mendominasinya *Social Media* dalam membuat jejaring di masyarakat yang sudah mengakar menjadi Gerakan masyarakat yang lebih massif, bahkan sebaliknya masyarakat berjejaring

mempunyai kemampuan untuk beradaptasi membentuk perubahan perilaku cara pandang politik yang lebih baik(Boestam et al., 2023).

G. Definisi Konsepsional

1. Politik Lingkungan

Politik Lingkungan (Ecological Politics) kajian yang dipergunakan untuk bisa memahami relasi antar masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui kondisi sosial dalam bentuk yang dinamis (akses dan kontrol) terhadap sumber daya alam serta implikasinya terhadap kelestarian lingkungan yang nantinya untuk berkelanjutan kehidupan. Politik lingkungan yang di maksud penulis merupakan aspek yang mengkaji ekonomi politik dari pengelolaan daya alam sebuah masyarakat.

2. Digital Democracy

Demokrasi digital, juga dikenal sebagai e-demokrasi atau demokrasi Internet, adalah sebuah konsep yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses politik dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dengan mendorong keterlibatan masyarakat, penentuan nasib sendiri secara politik, dan aksesibilitas informasi pemerintah. Demokrasi digital memberikan ruang baru bagi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, memberikan kemudahan akses informasi dan kesempatan menyampaikan pendapat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional peneliti dapat menggunakan fokus yang ada dalam melihat permasalahan tersebut. Hal ini tentu akan mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

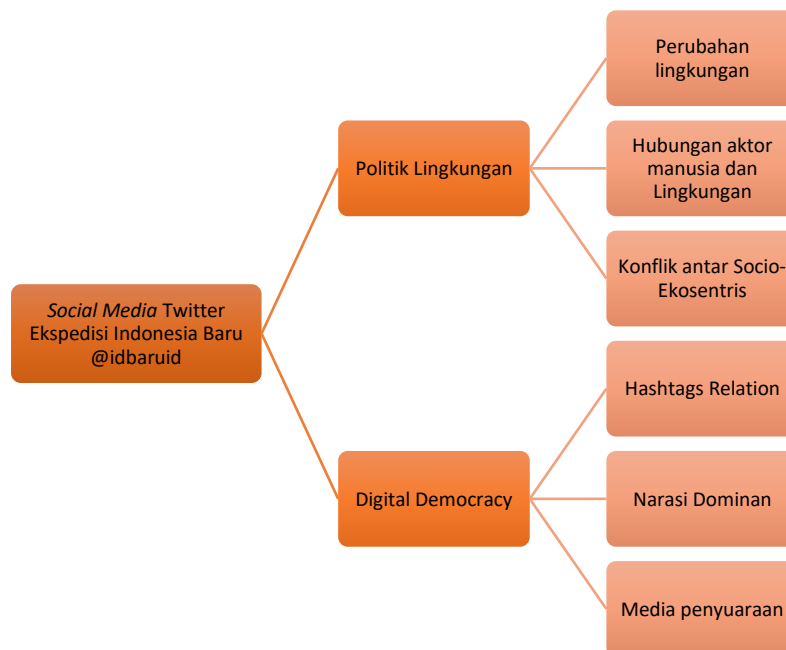
Tabel 1.3 Indikator Teori Konseptual Politik Lingkungan

Variabel	indikator	parameter
Politik Lingkungan	Manusia dan Lingkungan (<i>Humans and the Environment</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kontrol penuh dari masyarakat terhadap isu lingkungan.2. Adanya hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis.
	Kondisi Sosial (<i>Social conditions</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat permasalahan sosial yang dialami masyarakat.2. Adanya hubungan patronase elit pemerintah dan masyarakat.
Digital Democracy	Tema & Konten, Narasi dalam <i>Social media</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Pembagian Isu konten dan Tema Dominan dalam Social Media terkait pendayagunaan advokasi politik lingkungan.2. Pembagian media informasi, media penyaluran, media partisipasi dan media eksistensi.3. Narasi dominan yang tersebar di social media

I. Kerangka Berpikir

Dalam Penelitian ini mencoba melihat bagaimana penggunaan *Social media* dalam pendayagunaan penyuaran advokasi politik lingkungan. dalam kerangka pikir ini mencoba untuk bisa menggambarkan bagaimana *Social Media* digunakan dalam media pendayagunaan terhadap protes yang sering terjadi dimana dijelaskan pada gambar 1.3:

Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penelitian



Diolah: Penulis

Pada Gambar 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa variabel dalam Politik Lingkungan di dalam Digital Democracy, yang mana pertama kali dimulai dengan nya sebagai bentuk Perubahan Lingkungan yang akan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Politik Lingkungan ada peran Hubungan actor Manusia dan Lingkungan dan juga Konflik antar Socio-Ekosentris yang mana

terdapat Permasalahan antar lingkungan dan dampaknya, serta sebagai *Social Media* untuk Memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi. Dengan adanya wadah untuk pendayagunaan *digital democracy* berperan penting dalam menggunakan konten, narasi dalam *Social Media*, Maka fitur hashtags akan mendapatkan atensi dari *netizen* yang akan dapat wadah dalam pendayagunaan penyuaran advokasi. (Rahman, 2020)

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial (Creswell, 2014), Berdasarkan tujuan tersebut penelitian kualitatif menjadi metodologi yang paling tepat dalam mengungkap kecenderungan penggunaan dari *Social Media* dalam mengadvokasi konflik politik lingkungan, Dalam penelitian kualitatif peneliti akan fokus pada fenomena dan realitas sosial yang terjadi dan mengembangkan teori sosial yang didapatkan melalui empiri sesuai dengan fenomena dan kasus yang sedang diteliti (Somantri, 2005). Dalam penyampaian makna dan nilai menggunakan deskriptif yang mana dijelaskan secara runtut dan terstruktur sesuai dengan indikator pembahasan yang dijelaskan sebelumnya (Mason, 2017). Teknik komparatif digunakan dalam kajian ini untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana *Social Media* digunakan dalam media penyuaran pendapat dalam bentuk advokasi media.

Dalam kajian ini menggunakan data *Social Media* yang mana berfokus pada *Social Media Twitter* sebagai bahan kajian utama terkait dengan Demokrasi Digital dalam penyuaran advokasi konflik politik lingkungan. Dalam analisis data penelitian ini Menggunakan Qualitative Data Analysis Software (Q-DAS), tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nvivo 12Plus karena dengan menggunakan Nvivo 12Plus peneliti dapat mengkategorisasi data yang ada dalam Social Media agar memiliki hasil yang lebih terstruktur (Nizaruddin & Murtianto, 2017).

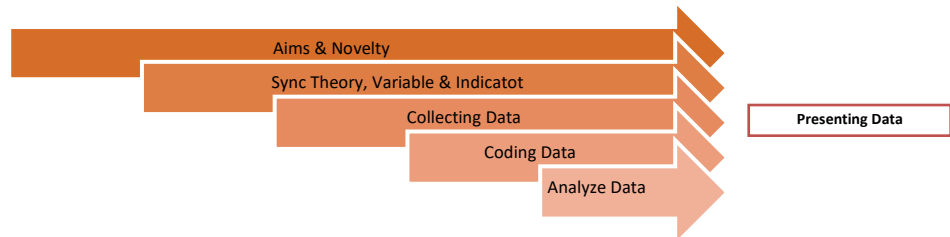
Project Maps Analysis di Nvivo 12 Plus adalah fitur canggih yang meningkatkan proses analisis data kualitatif. Alat ini memungkinkan peneliti untuk membuat representasi visual dari data proyek mereka, memfasilitasi pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan dan pola dalam informasi. Pengguna dapat membuat peta yang menunjukkan keterhubungan berbagai tema, konsep, atau simpul yang diidentifikasi dalam penelitian kualitatif mereka. Visualisasi ini berfungsi sebagai alat dinamis untuk eksplorasi, memungkinkan peneliti menavigasi kompleksitas data mereka dan mendapatkan wawasan tentang struktur dan koneksi yang mendasarinya. Salah satu keuntungan penting *Project Maps Analysis* di Nvivo 12 Plus adalah kemampuannya untuk menyederhanakan kolaborasi dan komunikasi di antara anggota tim peneliti. Dengan menyajikan data kualitatif yang kompleks dalam format visual, fitur ini mendorong komunikasi yang lebih jelas mengenai temuan dan wawasan. Peneliti juga dapat secara kolektif menafsirkan dan mendiskusikan peta visual, sehingga mendorong pendekatan analisis kualitatif yang lebih kolaboratif dan inklusif. Selain itu, sifat interaktif peta

ini memungkinkan peneliti untuk memodifikasi dan memperbarui peta seiring kemajuan analisis, memastikan bahwa representasi visual tetap dinamis dan mencerminkan pemahaman data penelitian yang terus berkembang. Secara keseluruhan, *Project Maps Analysis* di Nvivo 12 Plus berkontribusi pada proses penelitian kualitatif yang lebih efisien dan berwawasan luas, memberdayakan peneliti untuk mengungkap berbagai pola dan hubungan dalam data mereka.

Penggunaan Nvivo 12Plus memudahkan peneliti dalam menganalisis data menjadi beberapa tahapan saja yaitu: manage data, manage ideas, query data, visualize data, dan report from the data (Hedlund & McDougall, 2019). Manage data merupakan tahap pertama dimana bertujuan untuk melacak data data yang tersebar, dalam penelitian ini merupakan data literatur dan data Social Media . Manage Ideas merupakan tahap lanjutan untuk mengatur dan memberikan akses pada konsep atau teori yang mendukung terkait penelitian ini. Query Data merupakan dimana data diambil dari database yang telah ada atau yang telah direncanakan. Visualize Data adalah tahapan untuk menunjukkan isi dan atau struktur kasus, ide, konsep, pengambilan sampel, strategi, garis waktu pada berbagai tahapan proses penafsiran, dan hingga merepresentasikan secara visual. Report Data data yang ada akan dikembangkan untuk memiliki suatu nilai yang dapat diaplikasikan dalam penelitian.

Pada Penelitian ini memiliki tahapan penelitian dijelaskan pada gambar 1.4 berikut:

Gambar 1.4 Tahap Penelitian



Diolah oleh: Peneliti

Penelitian ini terdiri dari 6 fase yang mana terdiri dari:

1. Aims & Novelty dalam penelitian ini tahapan pertama adalah merumuskan tujuan dan juga melihat aspek kebaruan dari riset ini yang belum diteliti oleh penelitian Sebelumnya, sehingga dapat melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.
2. *Synchronization theory, Variabel & Parameter*, pada tahapan ini peneliti memilih dan mensinkronkan teori, variabel dan indikator untuk pelaksanaan penelitian. Tahapan ini memiliki tujuan untuk sinkronisasi antara penggunaan teori dan perumusan variabel dan indikator penelitian. Dalam riset mini teori dan Variabel yang ada adalah: Social Movement, Social Media, dan Collective Identity. Indikator penelitian ini yaitu: Konten, Narasi dalam *Social Media* , Relasi antar Hashtags, kategori aktor dan Identitas Kolektif.

3. *Collecting data*, fase ini merupakan pengumpulan data yang ada baik data Primer maupun Sekunder. Tujuan dalam tahapan ini adalah mengumpulkan serta menghimpun data penelitian baik data primer maupun sekunder dengan kaitan terkait fenomena yang diamati.
4. *Coding data*, pada tahap ini data yang ada akan dimasukkan dalam kategorisasi tertentu sesuai dengan isi atau content dari data yang ada. Tujuan tahapan ini adalah mengkategorisasi konten yang ada dalam data yang telah dihimpun sebelumnya.
5. *Analyze data* pada tahap ini, data akan dianalisis menggunakan Nvivo 12Plus. Analisis yang digunakan adalah Crosstab Query, Cluster Analysis dan Word Cloud Analysis.
6. *Presenting data* pada tahap ini, data yang telah dianalisis akan dinarasikan dan dikaitkan dengan teori yang ada, untuk menarik kesimpulan dan persepsi awal pada data yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendayagunaan Social Media dalam mengadvokasi sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan aksi. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah Indonesia dalam lingkup *Social Media Twitter* dengan tunggal, dalam pengumpulan data social media terkait pendayagunaan social media dalam akun Ekspedisi Indonesia Baru dengan waktu penelitian pada tanggal 10 Oktober hingga 30 November dalam pengumpulan data, pemilihan waktu penelitian ini dilakukan dari tanggal 30 Oktober dan 30 November dikarenakan data trend topic isu lingkungan diangkat mengalami kenaikan.

3. Jenis Data

Dalam penelitian data menjadi salah satu *poin* penting dalam tahap analisis dan penarikan hasil serta kesimpulan. Dalam kategorinya data terbagi menjadi dua jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Dalam kajian ini Jenis data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

a) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam kajian ini data sekunder yang digunakan berupa data dari buku, artikel jurnal, serta prosiding yang mana sesuai dengan basis teori Politik Lingkungan, *Social media*. Dalam kajian ini sumber terkait basis teori tersebut berguna untuk mempertajam argumentasi dan juga analisis terhadap advokasi politik lingkungan dalam segi demokrasi digital di Indonesia.

b) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti yang mana masih berupa data “mentah” sehingga diperlukan pengolahan menggunakan teknik olah data yang sesuai dengan karakteristik data yang ada. Dalam kajian ini menggunakan Data Primer yang mana merupakan data Social Media Twitter dimana berupa data hashtags dan juga akun, yang mana merujuk pada advokasi politik lingkungan dalam segi demokrasi digital di Indonesia. Kaitan terkait dengan akun yang digunakan adalah akun yaitu: @idbaruid Dalam Data primer berupa

hashtags yang digunakan dalam kajian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Hashtags	Description
Ekspedisi Indonesia Baru (2022 <i>Until</i> 2023)	
#Kalimantan	Makam leluhur warga desa Kenawan terancam, Lahan ini dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
#Wawonii #Harita Group	Merekam Konflik warga dengan perusahaan tambang Nikel, Pt Gema Kreasi Perdana, pencemaran air, perampasan lahan, hingga kriminalisasi menghantui warga sejak 2017 sampai hari ini.
#Labuan Bajo # Komodo	Warga Pulau Komodo hidup Bersama reptil purba yang biasa disebut Sabar (Komodo)
#Hari Laut Sedunia 2023	Memperingati Hari Laut Sedunia, dari laut sumber kehidupan dan penghidupan, diperlukan masyarakat perlu cawacawe dalam menjaga kelestarian Laut.
#Silat Tani	Geothermal digadang-gadang ramah lingkungan.
#Dragon4Sale #FACEBALI #10BaliBaru	Penghasutan dan pengunjukan rasa memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Sumber: Twitter @idbaruid, 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan sebuah Langkah penting dalam penelitian, oleh itu penulis memiliki tujuan utama yakni memperoleh data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pendekatan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema atau masalah penelitian yang ada (Adlini et al.,2022). Secara spesifik dan terperinci literatur yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian tentang media sosial, komunikasi politik dan pemilihan umum. Kajian pustaka tidak hanya sebatas data fisik seperti buku, artikel jurnal semata akan tetapi dapat berupa media cetak maupun daring dan artikel dapat berupa video yang berkaitan dengan tema yang sesuai dengan penelitian yang ada. Dalam studi pustaka ini, peneliti diharapkan dapat meniaga objektivitas dalam melakukan pengamatan sampai melakukan analisis fenomena yang terjadi.

b) Data Media Social

Data Media Sosial dalam Penelitian ini akan merujuk pada konten serta narasi yang digunakan, untuk melihat bagaimana

Social Media Ekspedisi Indonesia Baru membangun narasi serta konten Social Media sebagai bentuk pendayagunaan advokasi politik lingkungan tersebut. Data Social Media dikumpulkan menggunakan Coding data. Dengan coding data, penulis dapat mengumpulkan informasi terkait isi tema dan konten serta narasi yang dibangun oleh Social Media Ekspedisi Indonesia Baru. Dengan adanya data Social Media ini diharapkan dapat menggali lebih jauh informasi terkait pendayagunaan politik lingkungan melalui Social Media.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan satu tahapan dalam pengolahan data yang digunakan dalam penelitian untuk memiliki nilai, dan juga arti dalam penelitian. Dalam kajian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan sebagai berikut: Teknik analisis data menurut Moleong adalah kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya.

a) Teknik Analisis *Qualitative Data Analysis Software* (Q-DAS)

Penelitian ini menggunakan tiga macam analisis dengan menggunakan *Qualitative Analysis Software* (Q-DAS) dalam penelitian ini menggunakan analisis data mining tol Nvivo 12Plus. Perangkat lunak memberikan efisiensi

kebebasan dalam “mengelola” data memungkinkan penekanan yang lebih besar pada pemeriksaan makna dari apa yang direkam. Peneliti dapat memanfaatkan kapasitas komputer untuk merekam, menyortir, mencocokkan, dan menghubungkan data untuk membantu mereka menjawab pertanyaan penelitian mereka tanpa mengorbankan akses ke sumber data atau konteks dari mana data berasal. Dalam beberapa kasus, peneliti melaporkan bahwa perangkat lunak mengungkapkan cara baru untuk melihat data mereka yang tidak mereka sadari saat mengelola data secara manual (Edwards- Jones, 2014). Analisis dalam penelitian ini menggunakan tiga analisis dalam Nvivo 12Plus: Analisis grafik untuk mengetahui seperti apa isi Social media yang berbicara tentang pendayagunaan advokasi politik lingkungan dalam segi demokrasi digital di Indonesia. Analisis Cluster untuk mengetahui relevansi hastag dalam kasus dalam Ekspedisi Indonesia Baru. Analisis *Word Cloud* untuk mengetahui jenis narasi yang tersebar di Social media berbicara tentang Politik Lingkungan. Langkah-Langkah Analisis data dijelaskan pada gambar 1.5. sebagai berikut, serta adanya penjelasan terkait jenis analisis yang digunakan terdapat pada tabel 1.4.

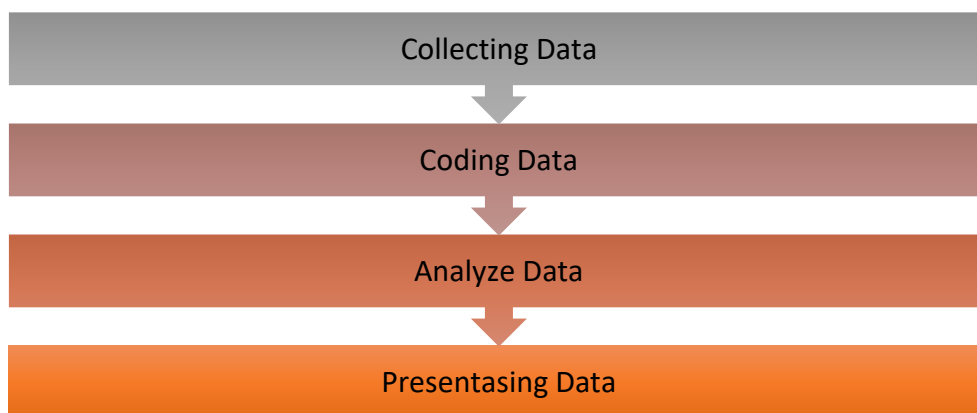
Table 1.4 Teknik Analisis Nvivo 12Plus

<i>Analysis</i>	Analisis Data	Tujuan Analisis
<i>Crosstab Query</i>	Analisis terkait dengan Content dan Kategori Aktor dan Tema dalam <i>Social Media</i>	Mengetahui konten dominan dalam Social Media dan Kategori aktor yang ada pada Social Media terkait

		Ekspedisi Indonesia Baru
<i>Project Map</i>	Analisis Kategori Aktor	Mengetahui hubungan Aktor dengan konten yang ada dalam <i>Social Media</i> .
<i>Cluster Analysis</i>	Analisis relasi hashtags	Mengetahui bagaimana nilai relasi hashtags 1 dengan yang lain
<i>Word Cloud</i>	Analisis Narasi dalam <i>Social Media</i>	Mengetahui Narasi & Identitas Kolektif yang tersebar pada <i>Social Media</i> terkait Social Movement di Indonesia dan Hongkong

Diolah: Penulis

GAMBAR 1.5 TAHAPAN ANALISIS DATA



Diolah: Penulis

Langkah-langkah analisis didefinisikan menjadi empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data, dalam proses menghimpun setiap informasi atau adanya fakta-fakta yang diperlukan untuk tujuan analisis data nantinya dari twitter.

2. Pengkodean data berarti menggunakan istilah, simpul, atau indikator untuk mengkategorikan data *Social Media* dan mengelompokkannya.
3. Setelah coding data, analisis data menggunakan tol di Nvivo 12Plus membuat data grafis atau statistik menggunakan tiga analisis *toll chart analysis, cluster analysis, dan word cloud analysis*.
4. Penyajian data, pada bagian ini menggunakan deskriptif untuk menyampaikan data dan nilai dengan menggunakan narasi dan deskriptif.